

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo periode 2009-2013. Hal tersebut karena pendapatan asli daerah (PAD) masih cenderung rendah dan masih perlu bantuan dana dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo periode 2009-2013. Nilai koefisiennya yakni negatif yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) lebih dominan digunakan untuk jenis belanja lain.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo periode 2009-2013. Hal tersebut karena pada dasarnya DAK dimaksudkan untuk membiayai belanja modal dari suatu daerah.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo periode 2009-2013 dengan nilai koefisien determinasi 20,80%. Sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo terus meningkatkan potensi daerah dengan cara mengalokasikan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat berdampak atau berkontribusi bagi peningkatan belanja modal. Langkah yang perlu dilakukan yakni dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dan mencanangkan program lain agar bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari provinsi semakin besar serta mengkaji sumber-sumber lain yang dapat menambah retribusi daerah.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa DAU berdampak negatif, sehingganya bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo terus meningkatkan alokasi DAU sejalan dengan belanja modal pemerintah sehingga terjadi keselarasan (hubungan akan positif). Langkah ini perlu dilakukan agar keperluan pembangunan dapat terjamin. Masih banyak sarana dan prasarana yang kurang tersentuh oleh Pemerintah, contohnya jalan untuk ke Pinogu pada Kabupaten Bone Bolango yang menyebabkan logistik untuk pemilihan kepala

daerah harus diangkut dengan berjalan kaki sepanjang 21 KM melewati jalan yang terjal. Kemudian sarana dan pra sarana untuk jalan yang banyak mengalami kerusakan.

3. Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan anggaran untuk keperluan dana alokasi khusus agar dana ini lebih banyak untuk menopang belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Hal ini harus menjadi perhatian penting sebab hampir semua kebutuhan pembangunan diambil dari dana alokasi khusus.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain terkait faktor yang mempengaruhi belanja modal karena dalam penelitian ini persentase pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti hanya sebesar 20,80%. Faktor lain tersebut dapat berupa sumber penerimaan daerah lainnya yang berupa dana bagi hasil, pinjaman dan SILPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, B.Z., (2010), Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun terhadap Pengembangan Wilayah Kecamatan Raya, *Tesis, Jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD), Universitas Sumatera Utara*
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT. Indeks.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kawedar, warsito dkk, 2008. *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang: Penerbit UNDIP
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002
- Kuncoro, Mudrajat. 2001. *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : UPP-AMP YKPN
- Miharbi, Liyoni Arista. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. *Skripsi*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
- Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permana. 2013. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Skripsi*
- Redaksi Gorontalo Post. <http://gorontalopost.com/2015/07/08/rp-255-dana-daerah-mengendap-di-bpd/>. Diunduh 28 Spetember 2015
- Rivai, Nasvira Shella. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Skripsi*

- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- Sugiyono. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- Sulistyowati, Diah, 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal, *Skripsi, Universitas Diponegoro*.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN